



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

BPK Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang

Serang, 31 Mei 2023 – Kepala Perwakilan BPK Banten, Emmy Mutiarini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 kepada Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, H. Kholid Ismail, S. Ag. dan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (31/5).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2022, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tangerang, kembali mendapatkan opini WTP. Pencapaian Opini WTP merupakan upaya dan hasil kerja dari seluruh pejabat dan pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Tangerang, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Pengelolaan Kas Belum Memadai;
2. Ketidaksihesuaian Klasifikasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun 2022;
3. Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai; dan

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP Dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per Semester II 2022, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menindaklanjuti 1.344 rekomendasi dari 1.449 rekomendasi atau **92,75%** dari seluruh rekomendasi periode 2009–2022. Dengan demikian masih terdapat 105 rekomendasi (7,25%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam sambutannya Emmy Mutiarini menyampaikan agar Pimpinan DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, BPK berharap agar Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. “Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ungkap Emmy Mutiarini.